PENERAPAN KELAS CALON PENGANTIN (Di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)

Atit Tajmiati¹, dan Endang Astiryani²

¹Program Studi DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

²Program Studi DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

tajmiati_atit@yahoo.co.id, endangasti@gmail.com

Diterima : 30 Oktober 2018

Direvisi : 10 November 2018

Diterbitkan : 07 Januari 2019

ABSTRACT

Violence against women (KtP) since 2010 continues to increase from year to year, the most prominent types of violence against women are domestic violence / personal relations (domestic violence / RP). The issue of legal protection for brides, especially protection of health insurance as mandated by the Decree of the Minister of Religion in the City of Tasikmalaya has not been implemented optimally, therefore one of the ways that can be done to improve public knowledge about health is by applying the bride class. The method used in this community service is the formation of the prospective bride class manager and the implementation of the prospective bride class, which aims to improve pre-marital health knowledge in an effort to improve the family health status in the District of Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. This community service has been carried out from April to September 2017. The results of this service are the formation of prospective bride class managers, the implementation of the prospective bride class, and there is an increase in pre-marital knowledge after the prospective bride class.

Keywords: prospective bride class

ABSTRAK

Angka kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sejak 2010 terus meningkat dari tahun ke tahun, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga/Relasi Personal (KDRT/RP). Masalah perlindungan hukum terhadap calon pengantin terutama perlindungan terhadap jaminan kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Keputusan Menteri Agama di Kota Tasikmalaya belum diimplementasikan secara optimal, oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan yaitu dengan cara penerapan kelas calon pengantin. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini berupa pembentukan pengurus kelas calon pengantin dan pelaksanaan kelas calon pengantin, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan pra nikah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan keluarga di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2017. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah telah terbentuknya pengurus kelas calon pengantin, terlaksananya kelas calon pengantin, dan terdapat peningkatan pengetahuan tentang pra nikah setelah dilakukan kelas calon pengantin.

Kata kunci : kelas calon pengantin

I. PENDAHULUAN

Angka kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sejak 2010 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.[1]

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga/Relasi Personal (KDRT/RP) yang mencapai angka 11.207 kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan ekonomi 971 kasus (9%).[1]

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal : kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.725 kasus (60%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.734 kasus (24%), kekerasan terhadap anak perempuan 930 kasus (8%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.[1]

Faktor penyebab utama yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan, menurut PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi salah satu dasar kategorisasi Badan Peradilan Agama khususnya dalam konteks perceraian, yakni : tidak adanya lagi keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, dan faktor ekonomi. Selain itu juga disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, krisis ahlak, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, kawin dibawah umur, faktor politis, cacat biologis, salah satu pihak dihukum dan lain-lain.[1]

Bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya kasus KDRT di Indonesia salah satunya melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamankan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).[2]

Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Nomor Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009DJ.II/PW.01/1997/2009. Peraturan tersebut mengamankan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin). Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang mau menikah, oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan yaitu dengan cara penerapan kelas calon pengantin.

II. METODE

Sesuai dengan analisis situasi, alternatif pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan diantaranya :

1. Persiapan
 - a. Konsolidasi ke Kelurahan Sukaasih dan KUA Kecamatan Purbaratu untuk menginformasikan tentang rencana kegiatan pengabdian masyarakat
 - b. Konsolidasi dengan kader terkait data pasangan calon pengantin
2. Pelaksanaan
 - a. Pembentukan pengurus kelas ibu hamil
 - b. Pelatihan pengurus kelas calon pengantin
 - c. Sosialisasi kelas calon pengantin
 - d. Pelaksanaan kelas calon pengantin

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil capaian kegiatan terbagi 2 yaitu :

1. Terbentuknya pengurus kelas calon pengantin

Adapun pengurus Kelas calon pengantin yang sudah dibentuk adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KELAS CALON PENGANTIN KELURAHAN SUKAASIH KECAMATAN PURBARATU

1. Pelindung	: Sunaryat HA, SmHK
2. Ketua	: Uu Kuraesin
3. Sekretaris	: Ani Hidayani
4. Bendahara	: Hj. Nunung Kurniasih
5. Seksi Pendaftaran	: Tintin Suryati (Koordinator) Gina Febriani (RW 1) Eka Megasari (RW 2) Tita Maspuroh (RW 3) Irah (RW 4) Rika Sartika (RW 5) Entin Hastati (RW 6) Susi Susilaningsih (RW 7) Iyet Cahyati (RW 8)
6. Seksi Pendidikan	: Yanti Susanti
7. Seksi Kepemudaan	: Sidi Efendi Abdul Aziz, ST
8. Seksi Humas	: Aoh Munawaroh Ai Lestari

2. Pengetahuan tentang pra nikah

Pada saat akan dilakukan kelas calon pengantin, diawali dan diakhiri dengan pembagian kuesioner tentang pengetahuan tentang pra nikah, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pre dan Post Tes Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan

Tabel 5.1

Pre Tes Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	5	38
Cukup	3	23
Kurang	5	38
Jumlah	13	100

Berdasarkan tabel 5.1 hasil tingkat pengetahuan tentang kesehatan sebagian besar dengan kategori baik dan kurang sebanyak 5 (38%), dan sebagian kecil dengan kategori cukup sebanyak 3 (23%).

Tabel 5.2

Pos Tes Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	6	46

Cukup	7	54
Kurang		
Jumlah	13	100

Berdasarkan tabel 5.2 hasil tingkat pengetahuan tentang kesehatan sebagian besar dengan kategori cukup sebanyak 7 (54%), dan sebagian kecil dengan kategori baik sebanyak 6 (46%).

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan tingkat pengetahuan tentang kesehatan, semula tingkat pengetahuan tentang kesehatan dengan kategori baik sebesar 38% meningkat menjadi 46%. Begitu pula setelah dilakukan kelas calon pengantin, tidak ada tingkat pengetahuan dengan kategori kurang.

- b. Pre dan Pos Tes Tingkat Pengetahuan tentang Gender

Tabel 5.3

Pre tes Tingkat Pengetahuan tentang Gender

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	5	38
Cukup	5	38
Kurang	3	23
Jumlah	13	100

Berdasarkan tabel 5.3 hasil tingkat pengetahuan tentang gender sebagian besar dengan kategori baik dan cukup sebanyak 5 (38%), dan sebagian kecil dengan kategori kurang sebanyak 3 (23%).

Tabel 5.4

Pos Tes Tingkat Pengetahuan tentang Gender

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	8	62
Cukup	5	38
Kurang		
Jumlah	13	100

Berdasarkan tabel 5.4 hasil tingkat pengetahuan tentang gender sebagian besar dengan kategori baik sebanyak 8 (62%), dan sebagian kecil dengan kategori cukup sebanyak 5 (38%).

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan tingkat pengetahuan tentang gender, semula tingkat pengetahuan tentang gender dengan kategori baik sebesar 38% meningkat menjadi 62%. Begitu pula setelah dilakukan kelas calon pengantin, tidak ada tingkat pengetahuan dengan kategori kurang.

- c. Pre dan Pos Tes Tingkat Pengetahuan tentang UU Pernikahan

Tabel 5.5

Pre tes Tingkat Pengetahuan tentang UU Pernikahan

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	7	54
Cukup	1	8
Kurang	5	38
Jumlah	13	100

Berdasarkan tabel 5.5 hasil tingkat pengetahuan tentang UU Kesehatan sebagian besar dengan kategori baik sebanyak 7 (54%), dan sebagian kecil dengan kategori cukup sebanyak 1 (8%).

Tabel 5.6
Pos Tes Tingkat Pengetahuan tentang UU Pernikahan

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	8	62
Cukup	5	38
Kurang		
Jumlah	13	100

Berdasarkan tabel 5.6 hasil tingkat pengetahuan tentang UU pernikahan sebagian besar dengan kategori baik sebanyak 8 (62%), dan sebagian kecil dengan kategori cukup sebanyak 5 (38%).

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan tingkat pengetahuan tentang UU pernikahan, semula tingkat pengetahuan tentang UU pernikahan dengan kategori baik sebesar 54% meningkat menjadi 62%. Begitu pula setelah dilakukan kelas calon pengantin, tidak ada tingkat pengetahuan dengan kategori kurang.

IV. SIMPULAN

1. Telah terbentuk pengurus kelas calon pengantin di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu. Struktur organisasi kelas calon pengantin terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pendaftaran, seksi pendidikan dan seksi humas dan telah di SK kan oleh Kepala Kelurahan Sukaasih
2. Terjadi peningkatan pengetahuan tentang pra nikah setelah dilakukan kelas calon pengantin

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2016. Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara. Jakarta.
2. Kemenag RI. 2004. Keputusan Menteri Agama No 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Jakarta.